

## ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN HIV/AIDS PADA GAY DI KABUPATEN BANYUWANGI

**Ananda Horizki Pratama, Hary Priyanto, Niko Pahlevi Hentina**

Prodi Studi Ilmu Administrasi Publik , FISIP Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi,  
anandarizky1516@gmail.com

**Abstract:** *Analysis Of Policy Implementation Of HIV/AIDS And Control On Gay In Banyuwangi District. This research was conducted to determine the implementation of HIV/AIDS prevention and control policies in Banyuwangi Regency. The HIV/AIDS status in Banyuwangi Regency is getting higher and is ranked second in East Java as an HIV/AIDS red zone. Cases of HIV/AIDS There are still many sufferers, for example cases that are often found in Banyuwangi Regency are people with HIV/AIDS in gay people. This study uses a qualitative method with a descriptive perspective, using observation data collection techniques, guided free interviews, and documentation. In the implementation of HIV/AIDS prevention and control policies for gays in Banyuwangi Regency, using the theory of William Dunn (2004) which focuses on 5 (five) aspects, namely: Policy Problems; The Future of Policy; Policy Action; Policy Results; and Policy Performance. The result of the research is that the Health Office along with KPA and other stakeholders have made efforts to control HIV/AIDS in Banyuwangi Regency, as has been written in the policy through Perda Number 5 of 2017. Namely gay, in the end not all certain communities can know the existence of regulations made by the government and have limited socialization and awareness of certain communities so that the existence of Regional Regulation Number 5 of 2017 is only limited to written regulations.*

**Keywords:** *Implementation, Policy, HIV/AIDS, Gay.*

**Absrak:** **Analisis Implementasi Kebijakan Pencegahan Dan Penanggulangan HIV/AIDS Pada Gay Di Kabupaten Banyuwangi.** Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui implementasi kebijakan pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS di Kabupaten Banyuwangi. Status positif HIV/AIDS di Kabupaten Banyuwangi semakin tinggi dan menduduki peringkat kedua se-Jawa Timur sebagai zona merah HIV/AIDS. Kasus HIV/AIDS masih banyak jumlah penderitanya, seperti contoh kasus yang banyak ditemui di Kabupaten Banyuwangi adalah penderita HIV/AIDS pada gay. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan perspektif deskriptif, dengan menggunakan teknik pengumpulan data observasi, wawancara bebas terpimpin, dan dokumentasi. Dalam menganalisis implementasi kebijakan pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS pada gay di Kabupaten Banyuwangi, peneliti menggunakan teori dari William Dunn (2004) yang berfokus pada 5 (lima) aspek, yaitu: Masalah Kebijakan; Masa Depan Kebijakan; Aksi Kebijakan; Hasil Kebijakan; dan Kinerja Kebijakan. Hasil penelitian adalah Dinas Kesehatan beserta dengan KPA dan para *stakeholder* telah melakukan upaya penanggulangan HIV/AIDS di Kabupaten Banyuwangi, sebagaimana telah ditulis dalam kebijakan melalui Perda Nomor 5 Tahun 2017. Namun karena kurangnya aksi sosialisasi secara menyeluruh kepada masyarakat sasaran dalam penelitian ini adalah masyarakat tertentu yaitu gay, pada akhirnya tidak seluruh masyarakat tertentu tersebut dapat mengetahui keberadaan peraturan yang telah di buat oleh pemerintah serta kurangnya jangkauan sosialisasi dan kurangnya kesadaran dari masyarakat tertentu tersebut sehingga keberadaan Perda Nomor 5 Tahun 2017 hanyalah sebatas peraturan yang tertulis.

**Kata Kunci :** Implementasi, Kebijakan, HIV/AIDS, Gay.

### Pendahuluan

Perkembangan sektor pariwisata yang sangat pesat di Kabupaten Banyuwangi telah membantu berbagai sektor yang lain selain pada perekonomian. Meski berdampak positif, keberadaan kepariwisataan di Kabupaten Banyuwangi dianggap beririsan

dengan dampak negatif, diantaranya munculnya prostitusi. Pandangan tersebut karena perkembangan status positif *Human Immunodeficiency Virus* (HIV) dan *Aquired Immuno Deficiency Syndrom* (AIDS). HIV/AIDS di Kabupaten Banyuwangi tergolong tinggi, meski Pemkab.

Banyuwangi telah memiliki kebijakan berbentuk Peraturan Daerah (Perda) nomor 5 tahun 2017, tentang: Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS.

Komisi Penanggulangan Aids (KPA) Kabupaten Banyuwangi mencatat pada tahun 2021 ada sebanyak 5.535 orang yang menderita penyakit HIV/AIDS. Berdasarkan data yang di himpun melalui web Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuwangi, tercatat hingga akhir tahun 2019 di Kabupaten Banyuwangi terdapat 1790 orang terinfeksi HIV dimana kondisi ini dinamakan AIDS. Dengan rincian 814 ialah kaum laki-laki dan 976 orang perempuan, sebagaimana tersampaikan pada lampiran Tabel 1.2. Berdasarkan dari data tersebut, Banyuwangi dapat dikatakan sebagai zona merah terjangkitnya HIV/AIDS. Dikutip dari data Dinas Kesehatan (Dinkes) Jawa Timur 2021, Banyuwangi menduduki peringkat kedua se-Jawa Timur setelah Kota Surabaya.

Kasus HIV/AIDS masih banyak jumlah penderitanya, seperti contoh kasus yang banyak ditemui di Kabupaten Banyuwangi adalah penderita HIV/AIDS pada *gay*. Menurut data dari KPA Kabupaten Banyuwangi tahun 2016 jumlah populasi *gay* di Kabupaten Banyuwangi sejumlah 302 orang, dan 3 persen dari populasi *gay* tersebut terpapar HIV/AIDS dikarenakan aktivitas seksual mereka yang kurang teredukasi.

Tentu terkait hal tersebut pentingnya pencegahan perilaku seksual berisiko. Perlunya optimalisasi peran pemerintah yang berkolaborasi dengan tokoh masyarakat, organisasi kemasyarakatan dan kepemudaan. Penjelasan tersebut sesuai dengan pendapat Sutikno selaku aparatur Pemkab. Banyuwangi pada 6 November 2021, di kantor Pemkab. Banyuwangi yang mengatakan bahwa: “Perilaku baik akan mendukung kebijakan pemerintah atau pada pokoknya prostisusi bukan bagian dari kepentingan pemerintah.” Berdasarkan asumsi tersebut peneliti beranggapan bahwa apabila suatu masyarakat dapat berperilaku dengan baik dan tidak melakukan aksi seperti prostitusi, tentu hal tersebut akan turut mendukung kebijakan pemerintah dan HIV/AIDS dapat diminimalisir.

HIV adalah penyakit yang dapat menurunkan sistem kekebalan tubuh secara drastis dan dapat menyebabkan kematian. Meski demikian, masyarakat terdampak HIV/AIDS tidak untuk di jauhi. Namun, masyarakat juga memandang seorang penderita HIV/AIDS sebagai seorang yang perlu dihindari. Orang Dengan HIV/AIDS (ODHA) memang layak terinfeksi penyakit HIV/AIDS karena perilaku yang telah dilakukan menjadi alasan latar belakang mengapa seseorang dapat terinfeksi virus tersebut. Dari hal tersebut pada akhirnya masyarakat takut dan mengucilkan penderita penyakit HIV/AIDS dari lingkup masyarakat.

Keterkaitan fenomena gap di atas tentu berkaitan dengan masalah kebijakan. Masalah kebijakan dalam hal pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS di Kabupaten Banyuwangi telah dibuat dengan kebijakan publik melalui Peraturan Daerah (Perda), dikarenakan kurangnya aksi pemerintah dalam penerapan dan pelaksanaannya perda tersebut dianggap belum efektif, dan menjadi masalah publik yang perlu perhatian dari pemerintah. Dengan adanya keberadaan perda masalah HIV/AIDS bukannya semakin menurun namun malah semakin meningkat. HIV/AIDS selalu dikaitkan dengan fenomena gunung es, yang muncul ke permukaan hanya merupakan bagian kecil dari keadaan sebenarnya, yang dimana hanya tampak puncaknya saja. Sama halnya penyakit HIV/AIDS yang tampak hanyalah kasus yang dilaporkan saja namun belum ada tindakan yang dilakukan sepenuhnya.

Pemkab Banyuwangi sebagai implementor kebijakan pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS masih belum memberikan edukasi terkait pencegahan penyakit ini. Karena dalam pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS terdapat tantangan yang dihadapi pemerintah. Hambatan tersebut terkait rendahnya pendidikan, kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat, dan masih adanya stigma diskriminasi, rendahnya pengetahuan tentang HIV/AIDS dan IMS, *missed opportunity* diagnosis, perawatan atau terapi dini dan akses dukungan

psikososial, serta terbatasnya akses dan utilisasi layanan, dan logistik dan SDM yang kurang memadai. Penyakit HIV/AIDS rentan tersebar terhadap beberapa individu yang memiliki orientasi seksual yang berbeda pada umumnya.

Gay merupakan salah satu kelompok risiko tinggi (*risti*) untuk tertular Infeksi Menular Seks IMS, HIV, dan AIDS. Dari beberapa pendampingan gay diketahui bahwa sebagian besar bekerja sebagai pekerja seks. Aktivitas seks mereka umumnya adalah seks anal dan oral. Seks anal atau melakukan hubungan seks melalui anus mempunyai risiko luka pada anus, karena bagian dari dinding anus sendiri sangat tipis tidak elastis, sehingga apabila adanya luka di daerah anus, dan kemungkinan terjadi pertukaran cairan darah luka ke penis maupun cairan sperma ke luka anus jika pasangan seks terkena IMS atau HIV maka akan lebih mudah ditularkan. Edukasi tentang pencegahan HIV/AIDS pada gay sangat diperlukan karena akan mencegah terjadinya penularan dengan melalui cara yang aman ketika melakukan hubungan seksual dan mempermudah akses pemerintah untuk merealisasikan kebijakan.

Realitas menunjukkan bahwa meskipun isu HIV/AIDS sudah menuju pada isu epidemi, tetapi penanganannya masih belum maksimal. Sehingga hasil yang diperoleh tidak signifikan. Berbagai kebijakan sudah disahkan, seringkali hanya sebatas dokumen yang sah dan ditandatangani pejabat negara, dan implementasi di lapangan sangat sedikit atau bahkan beberapa wilayah di Kabupaten Banyuwangi tidak terpapar dengan kebijakan tersebut. Aktor-aktor yang seharusnya terlibat dalam penanganannya, seperti pemerintah yang akan bertindak sebagai leader harus dapat meningkatkan advokasi, sosialisasi, pengembangan kapasitas, meningkatkan kemampuan manajemen, profesionalisme, meningkatkan aksesibilitas dan kualitas, serta meningkatkan jangkauan pelayanan untuk pelayanan HIV/AIDS. Tujuan lain dari Pemkab. Kabupaten Banyuwangi adalah menggerakkan program berbasis masyarakat, meningkatkan jejaring kerja, kemitraan dan kerjasama, serta

mengupayakan pemenuhan kebutuhan sumber daya. Untuk mencapai tujuan ini maka dibentuk layanan-layanan terpadu di Rumah sakit, Puskesmas, LSM, rutan atau lapas perlu dioptimalkan pada seluruh sektor terkait, *civil society organization* termasuk swasta dan tokoh masyarakat.

Penyelamatan generasi bangsa yang akan meneruskan pembangunan negeri dari ancaman HIV/AIDS merupakan hal penting. Hal ini dikaitkan dengan masa depan kebijakan. Masa depan kebijakan berkaitan dengan prosedur dalam membuat informasi aktual tentang situasi sosial di masa depan atas dasar informasi yang telah ada berdasarkan masalah kebijakan. Dalam hal ini pemerintah harus turut serta dalam keikutsertaannya dalam membantu mengurangi penyebaran HIV/AIDS dengan alternatif kebijakan. Salah satu cara yang ditempuh oleh Pemkab Kabupaten Banyuwangi dalam menanggulangi HIV/AIDS adalah dengan mengeluarkan kebijakan melalui Perda nomor 5 tahun 2017. Dalam Perda tersebut dijelaskan bahwasannya penanggulangan HIV/AIDS di Kabupaten Banyuwangi perlu lebih diintensifkan. Salah satu caranya adalah dengan merangkul pemerintah daerah serta lembaga-lembaga yang terkait untuk turut andil dalam berperan menanggulangi HIV/AIDS ini melalui adanya kebijakan publik.

Pemecahan masalah pencegahan HIV/AIDS di Kabupaten Banyuwangi sangat diperlukan suatu aksi kebijakan. Hal tersebut menjadi penting karena berkaitan tentang pertimbangan dari berbagai aspek dalam membuat sebuah kebijakan, karena proses kebijakan publik merupakan proses yang rumit dan kompleks serta menyangkut kepentingan masyarakat. Proses aksi kebijakan dapat dirumuskan dengan beberapa langkah yaitu *policy performance*, *policy futures*, *policy actions*, dan *policy outcomes*. Proses aksi kebijakan yang telah dirumuskan oleh Dunn adalah salah satu bagian dari analisis kebijakan yang merupakan suatu aktivitas intelektual dan praktis yang ditujukan untuk menciptakan, secara kritis menilai, dan mengkomunikasikan pengetahuan tentang

dan implementasi di dalam proses kebijakan. Menanggapi hal-hal di atas, Pemerintah sudah mengeluarkan Perda Nomor 5 Tahun 2017 tentang pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS di Kabupaten Banyuwangi.

Sebagai kabupaten yang telah berkembang cukup baik dengan berbagai sektor, Banyuwangi seharusnya dapat menjadi *role mode* atau contoh dalam memberikan pelayanan kesehatan yang terbaik khususnya dalam penanggulangan HIV/AIDS di Kabupaten Banyuwangi. Namun melihat *trend* kasus HIV/AIDS di Kabupaten Banyuwangi dari tahun ke tahun justru cenderung mengalami peningkatan, maka keberjalanan program pelayanan kesehatan untuk menanggulangi kasus HIV/AIDS proses implementasi perda dirasa perlu ditinjau lebih dalam apakah sudah berjalan dengan efektif serta efisiensi dalam menangani kasus HIV/AIDS di Kabupaten Banyuwangi ini, atau justru terdapat kendala-kendala yang menghambatnya.

Implementasi akan berkaitan dengan hasil kebijakan. Hasil kebijakan yakni berkaitan pemantauan bagaimana kebijakan tersebut telah diimplementasikan. Menurut Grindle (dalam Waluyo, 2007) bahwa "Implementasi kebijakan bukan hanya mengenai penjabaran suatu keputusan politik ke dalam prosedur birokrasi, melainkan lebih dari itu, menyangkut konflik, keputusan dan siapa yang memperoleh apa dari kebijakan". Dari apa yang disampaikan oleh Grindle tersebut implementasi kebijakan dilakukan untuk mendapatkan suatu hasil yang diperuntukkan oleh seseorang yang meminta kebijakan tersebut terkait permasalahan yang ada.

Terkait kinerja kebijakan menekankan pada evaluasi dari kinerja kebijakan tersebut. Beberapa teori yang telah dikemukakan oleh Mazmanian dan Sabatier (dalam Akib, 2010) bahwa "Peran penting dari kinerja implementasi kebijakan publik adalah kemampuannya dalam mengidentifikasi variabel yang mempengaruhi tercapainya tujuan-tujuan formal pada keseluruhan proses implementasi." Berbagai cara kinerja

kebijakan telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dan Dinas Kesehatan serta KPA (Komisi Penanggulangan Aids) dan LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) peduli AIDS dalam upaya menemukan penyintas HIV serta penanggulangan dan pencegahan HIV/AIDS di Kabupaten Banyuwangi, namun walau telah diupayakan dengan semaksimal mungkin, hingga saat ini angka peningkatan penyakit HIV/AIDS di Kabupaten Banyuwangi masih tetap tergolong meningkat, karena masih banyak kurang kesadaran bagi masyarakat yang sering melakukan aktivitas seksual dengan risiko tinggi seperti pada *gay* dan proses implementasi kebijakan yang dirasa kurang efektif khususnya di Kabupaten Banyuwangi. Dengan demikian kinerja kebijakan oleh pemerintah dalam pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS di Kabupaten Banyuwangi merupakan hal penting dalam penelitian ini untuk efektivitas implementasi kinerja kebijakan.

## Tinjauan Pustaka

### 1. Landasan Teori

#### 1.1 Kebijakan Publik

Kebijakan publik merupakan produk hukum yang diperoleh melalui suatu tindakan yang bersifat administratif, ilmiah dan politis yang dibuat oleh pembuat kebijakan dan pemangku kebijakan terkait." Menurut Thoha (2014:106), dalam arti yang luas *policy* mempunyai 2 (dua) aspek pokok antara lain: Pertama, sebagai *Policy* merupakan praktika sosial, ia bukan event yang tinggal atau terisolir. Dengan demikian, sesuatu yang dihasilkan pemerintah berasal dari segala kejadian dalam masyarakat dan dipergunakan pula untuk kepentingan masyarakat. Kejadian semacam ini tumbuh dalam praktika kehidupan masyarakat, dan tidak merupakan peristiwa yang berdiri sendiri, terisolasi dan asing bagi masyarakat. Kedua, sebagai *Policy* adalah suatu peristiwa yang ditimbulkan oleh baik untuk mendamaikan claim dari pihak-pihak yang konflik, atau untuk menciptakan incentive bagi tindakan bersama bagi pihak-pihak yang ikut menetapkan tujuan akan tetapi mendapatkan



perlakuan yang tidak rasional dalam usaha bersama tersebut.

## **1.2 Model Teori Analisis Kebijakan Dunn (2004)**

Pertama, Perumusan Masalah Kebijakan, masalah kebijakan yaitu nilai, kebutuhan, atau kesempatan yang belum terpenuhi, yang dapat diidentifikasi, untuk kemudian diperbaiki atau dicapai melalui tindakan publik. Menurut Dunn, (2013: 226) masalah kebijakan mempunyai ciri-ciri yaitu, terdapat saling ketergantungan antar masalah kebijakan, Mempunyai subjektifitas, Buatan manusia karena merupakan produk penilaian subjektif dari manusia, dan Besifat dinamis.

Kedua, Peramalan Masa depan kebijakan menurut Dunn (2013: 291) Peramalan atau *Forecasting* adalah suatu prosedur untuk membuat informasi faktual tentang situasi sosial dimasa depan atas dasar informasi yang telah ada tentang masalah kebijakan. Peramalan dapat menyediakan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan tentang masalah yang akan terjadi dimasa mendatang sebagai akibat dari diambilnya alternatif, termasuk tidak melakukan sesuatu Dunn (2013: 26). Menurut Dunn, (2003:291-292) Ramalan memiliki tiga bentuk utama yakni proyeksi, Prediksi, dan perkiraan.

Ketiga, Rekomendasi Aksi Kebijakan mengutip kembali dari (Dunn, 2013: 405) prosedur dari analisis kebijakan dari rekomendasi memungkinkan menghasilkan informasi tentang kemungkinan serangkaian serangkaian aksi dimasa mendatang untuk menghasilkan konsekuensi yang berharga bagi individu, kelompok atau masyarakat seluruhnya. Untuk membuat rekomendasi kebijakan juga mengharuskan kita menentukan alternatif mana yang paling baik. Sebagai mana menurut . Dunn, (2013: 27) “rekomendasi membantu mengestimasi tingkat resiko dan ketidakpastian, mengenali eksternalitas dan akibat ganda, menentukan kriteria dalam pembuat pilihan, dan menentukan pertanggungjawaban administrasi bagi Implementasi Kebijakan.”

Keempat, Pemantauan Hasil Kebijakan, Dunn (2013: 509) pemantauan hasil

kebijakan atau bisa disebut memonitoring merupakan prosedur analisis kebijakan yang digunakan untuk memberikan informasi tentang sebab akibat kebijakan Publik. Menurut Dunn (2013: 510) pemantauan setidaknya memainkan empat fungsi dalam analisis kebijakan yaitu; kepatuhan, akuntansi, pemeriksaan dan eksplanasi. Dunn (2013:514) membedakan jenis tindakan kebijakan menjadi dua, yakni kebijakan regulatif, yaitu tindakan kebijakan yang dirancang untuk menjamin keputusan terhadap standar prosedur tertentu, dan kebijakan alokatif yaitu tindakan mengalokasikan sumber daya tertentu pada sasaran kebijakan.

Kelima, Evaluasi Kinerja Kebijakan, kebijakan publik merupakan bagian dari proses analisis kebijakan. Menurut Dunn (2013: 632) fungsi evaluasi dalam analisis kebijakan adalah menyediakan informasi valid dan dapat dipercaya mengenai kinerja kebijakan, kemudian memberikan kejelasan dan kritik nilai-nilai yang mendasari pilihan tujuan, sasaran, dan penyediaan informasi bagi perumusan masalah dan informasi praktis. Dunn (2013:612) mengembangkan tiga pendekatan dalam evaluasi kebijakan, yaitu evaluasi semu, evaluasi formal, dan evaluasi reoritis.

## **1.3 Gay**

*Gay* adalah sebuah istilah yang umumnya digunakan untuk merujuk orang homoseksual atau sifat-sifat homoseksual. Istilah ini awalnya digunakan untuk mengungkapkan perasaan "bebas atau tidak terikat", "bahagia", atau "cerah dan menyolok". Kata ini mulai digunakan untuk menyebut homoseksual mungkin semenjak akhir abad ke-19 M, tetapi menjadi lebih umum pada abad ke-20. Dalam bahasa inggris modern, *gay* digunakan sebagai kata sifat dan kata benda, merujuk pada orang terutama pria *gay* serta aktivitasnya, serta budaya yang diasosiasikan dengan homoseksualitas. Di Indonesia, dikenal istilah kaum belok sebagai istilah peyorasi untuk merujuk pada komunitas homoseksual.

Istilah *gay* juga termasuk homoseksual paling sering digunakan untuk

mengambarkan perilaku seseorang, orientasi seksual, dan rasa identitas pribadi atau sosial. Orientasi seksual digambarkan sebagai objek impuls seksual seseorang heteroseksual (jenis kelamin berlawanan), homoseksual (jenis kelamin sama) atau biseksual (kedua jenis kelamin). Selain itu *gay* merupakan istilah yang merujuk pada orientasi seksual individu homoseks. Sebagaimana menurut Surbakti (2009:150) “Homoseks berasal dari bahasa Yunani, yaitu *“humos”* yang berarti sama. Jadi homoseksual adalah aktifitas seksual dengan kelamin sejenis yang berarti seseorang erotis tertarik pada sesama perempuan atau sesama lelaki.” Homoseksual merupakan suatu hubungan, baik bermusuhan atau bersahabat, dengan satu anggota dari jenis kelamin yang sama. Kata “homoseksual” mempunyai makna spesifik sebagai sebuah gangguan emosional. Sementara para analis terbaru menyimpulkan bahwa homoseksualitas adalah gejala simptom dari kesulitan-kesulitan personal secara umum.

#### **1.4 HIV/AIDS**

HIV yang merupakan singkatan dari *Human Immunodeficiency Virus* adalah Virus Penyebab AIDS. Virus ini menyerang dan merusak sistem kekebalan tubuh sehingga individu tidak bisa bertahan terhadap penyakit-penyakit yang menyerang tubuhnya. Sistem kekebalan tubuh rusak atau lemah mudah terserang penyakit yang ada di sekitar kita seperti TBC, diare, sakit kulit, dan lain-lain. HIV terdapat di dalam cairan tubuh seseorang yang telah terinfeksi seperti didalam darah, air mani (cairan sperma) atau cairan vagina dan air susu ibu. Sebelum HIV berubah menjadi AIDS, penderitanya akan tampak sehat dalam kurun waktu kira-kira 5 sampai 10 tahun. Walaupun tampak sehat, mereka dapat menularkan HIV pada orang lain melalui hubungan seks tidak aman, transfusi darah atau pemakaian jarum suntik secara bergantian.

AIDS atau *Acquired Immune Deficiency Syndrome* adalah suatu sindrom (kumpulan gejala) yang menyebabkan turunnya atau hilangnya

sistem kekebalan tubuh manusia. AIDS adalah tahap akhir dari infeksi virus HIV ketika sistem kekebalan tubuh telah sangat rusak, sehingga tidak dapat melawan infeksi ringan sekalipun dan pada akhirnya menyebabkan kematian. HIV dan AIDS secara klinis untuk pertama kali dilaporkan di Amerika Serikat pada tahun 1981, di mana fase penyebaran HIV dan AIDS dimulai. Virus HIV adalah retrovirus yang mempunyai kemampuan menggunakan RNA-nya dan DNA pejamu untuk membentuk virus DNA dan dikenali selama periode inkubasi yang panjang. HIV menginfeksi tubuh dengan periode inkubasi yang panjang dan menyebabkan munculnya tanda dan gejala AIDS. HIV menyebabkan beberapa keusakan sistem imun dan menghancurkannya. Hal tersebut terjadi dengan menggunakan DNA dari CD4+ dan limfosit untuk mereplikasi diri. Dalam proses itu, virus tersebut menghancurkan CD4+ dan limfosit.

#### **Metode Penelitian**

Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Metode kualitatif adalah suatu penelitian ilmiah yang tujuannya adalah untuk memahami suatu fenomena dalam kehidupan sosial secara alami dengan mengedepankan proses hubungan komunikasi yang mendalam antara peneliti dengan fenomena yang diteliti.

Lokasi penelitian di Kabupaten Banyuwangi, dengan situs penelitian di Kantor KPA (Komisi Penanggulangan AIDS) Kabupaten Banyuwangi. Teknik yang digunakan dalam menentukan informan adalah menggunakan teknik *purposive sampling* dan *snowball sampling*. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data mengadopsi teknik Miles dan Hubberman yang diterjemahkan dimana analisis model interaktif ini melalui

3 tahap yakni reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Adapun dalam pemeriksaan keabsahan data yaitu uji kredibilitas, uji keteralihan, uji kebergantungan, dan uji konfirmabilitas.

## Pembahasan

### 1. Masalah Kebijakan

Masalah kebijakan yaitu nilai, kebutuhan, atau kesempatan yang belum terpenuhi, yang dapat diidentifikasi, untuk kemudian diperbaiki atau dicapai melalui tindakan publik. Masalah kebijakan mempunyai ciri-ciri yaitu, terdapat saling ketergantungan antar masalah kebijakan, Mempunyai subjektifitas, Buatan manusia karena merupakan produk penilaian subjektif dari manusia, dan Besifat dinamis. Dan dalam fase-fase perumusan masalah kebijakan disebutkan sebagai berikut yaitu pencarian masalah, pendefinisian masalah, spesifikasi masalah, dan pengenalan masalah. Dalam penelitian ini masalah kebijakan yang dimaksud merupakan masalah mengenai keberadaan Perda Nomor 5 Tahun 2017 tentang pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS yang pada dasarnya Pemkab. Banyuwangi telah menyadari adanya peningkatan dan perkembangan HIV/AIDS yang semakin tinggi, tentu dengan adanya keberadaan Perda Nomor 5 Tahun 2017 kasus HIV/AIDS di Kabupaten Banyuwangi terus meningkat setiap tahun.

Keberadaan Peraturan Daerah tidak dapat menjamin berlangsungnya suatu masalah dapat ditangani secara cepat dan mudah perlu adanya kolaborasi antara sesama masyarakat serta pihak pemerintah maupun *stakeholder* yang dalam hal HIV/AIDS di Kabupaten Banyuwangi adalah seperti Dinas Kesehatan, KPA, LSM, dan masyarakat. Perlu kita pahami bersama bahwa, peran pemerintah dalam menanggulangi HIV/AIDS di Kabupaten Banyuwangi masih menjadi *domain* utama dalam melaksanakannya. Dalam Perda Nomor Tahun 2017 tentang pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS dapat dipahami bahwa Pemkab. Banyuwangi beserta Dinas Kesehatan, KPA, serta *stakeholder*

melakukan aksi sosialisasi kepada beberapa masyarakat khususnya pada populasi kunci. dapat dipahami bahwa sebaik apapun upaya yang dilakukan oleh pemerintah, jika tidak kesadaran atau peran aktif dari masyarakat itu sendiri tentang pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS, maka upaya yang dilakukan oleh pemerintah tidak akan berjalan sebagaimana yang diharapkan.

Pemkab. Banyuwangi bersama dengan Dinas Kesehatan serta para *stakeholder* telah berupaya melakukan sosialisasi dengan masyarakat khususnya populasi kunci dalam penanggulangan HIV/AIDS di Kabupaten Banyuwangi. Namun, tidak meratanya akses kepada seluruh populasi kunci tersebut tentu membuat upaya strategi yang telah dilakukan tidak berjalan dengan sesuai. Kurangnya sosialisasi tentang keberadaan Perda Nomor 5 Tahun 2017 tentang pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS di Kabupaten Banyuwangi, memicu kurang sadarnya masyarakat akan tata cara pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS, terutama pada masyarakat sasaran atau populasi kunci.

### 2. Masa Depan Kebijakan

Masa depan kebijakan atau *Forecasting* adalah suatu prosedur untuk membuat informasi faktual tentang situasi sosial dimasa depan atas dasar informasi yang telah ada tentang masalah kebijakan. Peramalan dapat menyediakan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan tentang masalah yang akan terjadi dimasa mendatang sebagai akibat dari diambilnya alternatif, termasuk tidak melakukan sesuatu. Peramalan memiliki tiga bentuk utama yakni proyeksi, Prediksi, dan perkiraan.

Dalam penelitian ini tujuan yang akan dicapai dari Masa Depan Kebijakan yakni dengan keberadaan Perda nomor 5 tahun 2017, diharapkan dapat memprediksikan apakah perkembangan HIV/AIDS tersebut stugnan atau turun. Pemkab. Banyuwangi sebagai implementor kebijakan melalui perda dapat memprediksikan bagaimana perda tentang pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS dapat berjalan

sesuai dan relevan dengan masyarakat sasaran pencegahan HIV/AIDS.

Dalam melaksanakan upaya pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS di Kabupaten Banyuwangi, keberadaan Peraturan Daerah sangatlah dibutuhkan untuk memprediksi bagaimana keberadaan Peraturan Daerah tersebut dapat sesuai dan berjalan terhadap masyarakat sasaran. Dengan keberadaan peraturan di suatu wilayah tentu diharapkan dapat membantu mengatasi persoalan terkait masalah yang di hadapi.

Perkembangan angka positif HIV di Kabupaten banyuwangi terus meningkat, untuk memberikan edukasi yang baik kepada masyarakat dalam menanggulangi dan mencegah penyakit HIV, Pemkab. Banyuwangi telah mengatur kewenangan dan menciptakan sebuah regulasi seperti yang sudah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS. Regulasi tersebut dimaksudkan untuk mencegah HIV/AIDS untuk di deteksi lebih dini dan menekan laju pertumbuhan HIV/AIDS serta meningkatkan kepercayaan diri bagi penderita yang disebut sebagai ODHA, serta memutus rantai HIV/AIDS guna melindungi masyarakat Kabupaten Banyuwangi dari HIV/AIDS. Sasaran dicakup adalah seluruh lapisan masyarakat yang berada di wilayah Kabupaten Banyuwangi. Hal ini dimaksud agar proses penanggulangan dan pencegahan dapat berjalan sesuai terhadap target yang telah ditetapkan.

Dalam upaya pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS di Kabupaten Banyuwangi. Pemkab. Banyuwangi melalui KPA Kabupaten Banyuwangi telah melakukan tugasnya yaitu memberikan koordinasi terhadap pihak-pihak yang terkait untuk mengedukasi masyarakat sasaran seperti hal ini masyarakat tertentu yaitu *gay* dalam mengenalkan adanya peraturan. Keberadaan Perda Nomor 5 Tahun 2017 diprediksi mengikat angka peningkatan HIV/AIDS yang semakin tinggi setiap tahun.

### **3. Aksi Kebijakan**

Dalam penelitian ini sebagaimana aksi kebijakan dalam pelaksanaan atau implementasi Perda Nomor 5 Tahun 2017 tentang pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS, Pemkab. Banyuwangi berkolaborasi dengan *stakeholder* atau contohnya seperti LSM yang dibantu dengan Komisi Penanggulangan Aids (KPA) Kabupaten Banyuwangi dalam menyelesaikan probelmatika HIV/AIDS. Implementasi perda tersebut dapat menjadi aksi kebijakan yang memiliki tujuan untuk menyelesaikan penyakit HIV/AIDS di Kabupaten Banyuwangi.

Dapat dipahami bahwa pelaksanaan aksi dalam pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS di Kabupaten Banyuwangi dalam bentuk tindakan melakukan VCT terhadap populasi kunci seperti halnya masyarakat tertentu dalam hal ini adalah *gay* tentu perlu membutuhkan keseriusan dalam pelaksanaan aksi tersebut. Karena jika hal tersebut hanya menjadi suatu upaya, agenda, atau strategi saja tanpa dilaksanakan aksi secara serius, maka upaya pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS di Kabupaten Banyuwangi tidak akan berjalan dengan baik sebagaimana mestinya.

Akses VCT yang telah disediakan oleh Pemkab. Banyuwangi tidak dapat dipahami secara mendalam oleh seluruh masyarakat dan masih belum cukup berhasil. Padahal disetiap puskesmas akses pelayanan VCT telah disediakan, namun dikarenakan kurang adanya kesadaran dari masyarakat tertentu dalam hal ini adalah *gay* keberadaan VCT masih belum menggugah kesadaran masyarakat tertentu tersebut.

Pemkab. Banyuwangi telah berupaya dalam menekan angka HIV/AIDS turun setiap tahunnya, dengan adanya tes VCT diharapkan upaya penanggulangan HIV/AIDS dapat berjalan sesuai dengan aksi kebijakan dalam Perda Nomor 5 Tahun 2017 yang dimana dalam hal ini akses VCT dalam diakses pelayanannya melalui seluruh puskesmas di Kabupaten Banyuwangi secara gratis dan dijamin kerahasiannya, namun ternyata himbauan dari peraturan tersebut tidak dilaksanakan secara menyeluruh oleh masyarakat sasaran dalam hal ini adalah



masyarakat tertentu yaitu *gay*, masih banyak yang mengetahui tata cara tes VCT.

Tidak semua masyarakat tertentu dalam hal ini *gay* memahami pentingnya VCT, banyak dari mereka yang tidak mengetahui apa itu VCT dan pentingnya bagi kesehatan mereka meski Pemkab. Banyuwangi telah menyarankan melakukan VCT terhadap 5 (lima) populasi kunci di dalam Perda Nomor 5 Tahun 2017 tentang pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS, namun masih banyak masyarakat tertentu dalam hal ini *gay* yang masih tidak melakukan VCT akan pasca melakukan aktivitas seksual mereka yang berisiko.

Peran KPA Kabupaten Banyuwangi dalam membantu aksi dari pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS di Kabupaten Banyuwangi adalah dengan saling bekerja sama dan juga saling mengkoordinir dinas-dinas lain dalam membantu keberhasilan aksi dari Perda Nomor 5 Tahun 2017 tentang pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS. Tentu diharapkan dengan adanya ODHA yang tidak memiliki kelengkapan data pribadi dalam mengakses pengobatan tentu hal ini dikhawatirkan menghambat proses pengobatan ODHA dalam mengakses layanan kesehatan di beberapa rumah sakit rujukan HIV/AIDS di Kabupaten Banyuwangi.

#### 4. Hasil Kebijakan

Pemantauan Hasil Kebijakan atau bisa disebut memonitoring merupakan prosedur analisis kebijakan yang digunakan untuk memberikan informasi tentang sebab akibat kebijakan Publik. Pemantauan setidaknya memainkan empat fungsi dalam analisis kebijakan yaitu; kepatuhan, akuntansi, pemeriksaan dan eksplanasi. Dengan hasil kebijakan, baik KPA atau LSM bahkan Pemkab. Banyuwangi melalui Dinas Kesehatan melakukan pemantauan atau monitoring, yang diantaranya adalah melakukan pendataan di setiap wilayah di Kabupaten Banyuwangi dan telah mengatur keberadaan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam perda, sebagai sekumpulan masyarakat yang berpartisipasi dalam proses penanggulangan HIV/AIDS di Kabupaten Banyuwangi.

Kegiatan monitoring sendiri dilakukan untuk mengetahui dimana saja titik hotspot dari populasi kunci yang berisiko dalam aktivitas seksualnya terinfeksi HIV/AIDS. Monitoring sendiri berfungsi sebagai pertemuan *stakeholder* seperti LSM peduli AIDS di Kabupaten Banyuwangi dan seperti komunitas Pelangi Laros pastinya sebagai advokasi untuk mempermudah teman-teman seperti mengakses kesehatan dampaknya pasti juga kepada masyarakat luas, ketika kita bisa menata teman-teman masyarakat tertentu seperti *gay* lebih peduli kepada kesehatan, mencegah penularan HIV/AIDS, sehingga keluarga mereka juga tidak akan tertular.

Dalam melakukan rencana kegiatan KPA Kabupaten Banyuwangi memiliki faktor kendala saat proses dalam penanggulangan HIV/AIDS, kendala tersebut berada di biaya, kalau jika KPA ingin melakukan acara bersama dengan teman-teman komunitas seperti *gay* apabila tidak ada biayanya pasti cukup sulit, sedangkan biasanya kalau KPA mengadakan acara KPA selalu menganggarkan setidaknya makan, dan uang saku, karena pihak KPA mengerti sebagian dari mereka komunitas *gay* pasti ada yang memiliki jam kerja sedangkan apabila mereka ajak pertemuan mereka pasti meninggalkan pekerjaannya, paling tidak hal yang di anggarakan tadi adalah sebagai gantinya.

Titik temu dari perkumpulan masyarakat tertentu dalam hal ini adalah *gay* sangatlah beragam, ada yang bertemu di hotel atau kos-kosan, serta tidak sedikit dari mereka menggunakan aplikasi *dating* khusus kalangan *gay* dalam mencari partner mereka. *Gay* di Kabupaten Banyuwangi menggunakan media sosial dalam mengungkap orientasi mereka. Namun, beberapa dari mereka tidak secara gamblang mengungkap orientasi mereka di profil sosial media tersebut hanya seperti contoh salah satu cara yang paling sederhana adalah dengan mengunggah *icon* bendera pelangi di profil mereka, dan memasang foto profil yang menurut mereka dapat menarik perhatian *gay* yang lain. Dengan banyaknya populasi masyarakat tertentu seperti *gay* tentu dikhawatirkan apabila mereka tidak

mendapatkan monitoring yang baik terhadap aksi yang dilakukan baik oleh Pemkab. Banyuwangi, Dinas Kesehatan, maupun KPA dalam upaya penanggulangan HIV/AIDS di Kabupaten Banyuwangi.

Dapat dipahami bahwa, untuk saat ini obat ARV hanya dapat menonaktifkan virus dalam tubuh ODHA agar virus tersebut tidak meluas ke seluruh tubuh, oleh karena itu obat ARV merupakan satu-satunya cara agar virus yang telah masuk ke dalam tubuh manusia agar tidak meluas dan mengembalikan sistem kekebalan tubuh manusia.

### **5. Kinerja Kebijakan**

Kinerja kebijakan dalam penelitian ini tentu dapat menjadi tahap evaluasi bagi Pemkab. Banyuwangi untuk menganalisis bagaimana keberadaan Perda Nomor 5 Tahun 2017 dapat berjalan lancar sesuai dengan upaya Pemkab. Banyuwangi dalam menyintas penyakit HIV/AIDS.

Dapat dipahami bahwa untuk mencapai suatu tujuan suatu daerah untuk semua aspek lembaga harus bekerja sama untuk kesejahteraan masyarakat Banyuwangi. Peran kepala daerah dan wakil daerah sangat penting dalam pembentukan peraturan daerah. Tidak hanya kepala daerah dan wakil daerah saja tapi peran DPRD sangat penting karena DPRD adalah wakil rakyat yang menampung keluhan kesah rakyat. Harus adanya konsolidasi yang tepat antara kepala daerah dengan wakil rakyat.

Sudah menjadi keharusan dan tanggung jawab moral bagi pemerintah untuk melaksanakan tugas Negara yang berpedoman pada dasar Negara Indonesia, dan selalu menjaga keutuhan Negara Republik Indonesia. Untuk tidak korupsi dan tidak mengedepankan kepentingan pribadi serta menyusun skala prioritas yang tepat demi kepentingan bersama. Mengedepankan serta menerapkan perilaku yang bijak dalam pengambilan keputusan saat ada masalah dalam kelembagaan atau yang lain.

Seharusnya Peraturan Daerah bukan hanya sebatas regulasi yang tertulis saja. Melainkan suatu tahap awal yang harus dilakukan untuk merubah sesuatu menjadi

lebih baik lagi. Karena pada dasarnya, Peraturan Daerah merupakan tahap awal yang dilakukan pemerintah dalam membantu menanggulangi kasus HIV/AIDS yang semakin tinggi. Sebagai warga negara yang baik kita juga harus menghargai upaya yang telah dilakukan pemerintah tentang pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS tersebut. Tetapi pemerintah juga harus melakukan upaya tersebut dengan serius. Misalnya melakukan sosialisasi secara merata kepada seluruh masyarakat umum serta populasi kunci seperti contohnya dalam penelitian ini adalah masyarakat tertentu yaitu *gay* di Kabupaten Banyuwangi, sehingga seluruh masyarakat di Kabupaten Banyuwangi dapat mengetahui informasi tentang pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS di Kabupaten Banyuwangi.

KPA Kabupaten Banyuwangi memiliki tugas pokok yang harus dilaksanakan dengan baik, yang bertujuan agar dapat memberikan pelayanan yang memuaskan kepada masyarakat, terlebih tugas pokok yang dimiliki oleh KPA Kabupaten Banyuwangi telah diatur didalam Perda Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS di Kabupaten Banyuwangi. Yang berarti bahwa setiap tugas pokok yang dimiliki KPA Kabupaten Banyuwangi harus dapat dipertanggung-jawabkan kepada Bupati melalui KPA.

Sosialisasi merupakan strategi yang bisa di aplikasikan dalam masyarakat karena dengan cara memberikan pemahaman dan pendekatan kepada masyarakat dapat memudahkan Komisi Penanggulangan AIDS dalam memiliki tujuan melakukan semua kegiatan pencegahan yang di bentuk melalui perda tentang pencegahan dan penanggula ngan HIV/AIDS. Tujuan dengan dilakukannya kegiatan pencegahan HIV/AIDS adalah sebagai bentuk pemberian informasi dan edukasi kepada seluruh masyarakat baik itu para remaja, pelajar, orang tua, instansi-instansi atau dinas-dinas terkait, kelompok populasi kunci dan seluruh ODHA agar mendapatkan pemahaman tentang HIV/AIDS baik dalam segi pencegahan, pengobatan sampai dengan

kerjasama dengan berbagai pihak untuk melakukan pencegahan HIV/AIDS.

Sosialisasi yang dilakukan oleh KPA Kabupaten Banyuwangi masih belum maksimal tetapi sosialisasi yang dilakukan mendapat beberapa respon yang positif oleh masyarakat, tetapi masih banyak pula minat masyarakat yang masih kurang untuk mengikuti atau hadir dalam sosialisasi yang dilakukan oleh KPA Kabupaten Banyuwangi. Dari hasil beberapa pengamatan, maka dapat disimpulkan bahwa selama ini KPA Kabupaten Banyuwangi sudah menjalankan tugasnya secara dengan baik dalam memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat dan populasi kunci, tetapi sosialisasi yang dilakukan belum begitu optimal karena dengan keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran sehingga untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan masih belum optimal.

### **Simpulan**

*Pertama*, Masalah Kebijakan: Perda Nomor 5 Tahun 2017 telah membantu menemukan masalah yang ada terkait kasus HIV/AIDS di Kabupaten Banyuwangi, namun tidak secara efektif untuk menyelesaikan kasus HIV/AIDS yang semakin tinggi setiap tahun. *Kedua*, Masa Depan Kebijakan: Upaya penanggulangan HIV/AIDS yang telah dilakukan oleh pemerintah tidak dapat diketahui secara menyeluruh oleh masyarakat. *Ketiga*, Aksi Kebijakan: Kurangnya aksi sosialisasi secara menyeluruh kepada masyarakat khususnya populasi kunci di wilayah Kabupaten

Banyuwangi maka masih banyak populasi kunci khususnya masyarakat tertentu seperti *gay* yang tidak melakukan upaya pengetahuan status kesehatan HIV sejak dini. *Keempat*, Hasil Kebijakan: Kegiatan sosialisasi belum optimal di Kabupaten Banyuwangi dikarenakan akses pencairan dana yang terbilang lambat menjadi faktor penghambat. *Kelima*, Kinerja Kebijakan: Hasil kinerjanya hanya sebatas peraturan yang tertulis masyarakat tidak mengetahui keberadaan Perda.

### **Saran**

*Pertama*, Masalah Kebijakan: Pemkab. Banyuwangi perlu merumuskan kembali strategi kebijakan secara terstruktur, dan sistematis dalam menyelesaikan masalah kasus HIV/AIDS; *Kedua*, Masa Depan Kebijakan: Keberadaan perda perlu untuk dikenalkan kepada masyarakat sebagai aturan yang dapat meminimalisir angka positif HIV/AIDS di masa depan; *Ketiga*, Aksi Kebijakan: Perlu adanya kerja sama yang baik dalam mensosialisasikan tata cara pencegahan HIV kepada seluruh masyarakat berdasarkan pada peraturan yang sudah ada; *Keempat*, Hasil Kebijakan: Pemerintah harus mendukung akses pencairan dana kepada dinas dan lembaga teknis terkait pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS; *Kelima*, Kinerja Kebijakan: Perlu dilakukan pendekatan yang lebih efektif dan secara langsung dari pemerintah kepada masyarakat sasaran.

---

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Akib, Haedar. (2010). *Implementasi Kebijakan: Apa, Mengapa, dan Bagaimana*. Jurnal Administrasi Publik, 1(1), 6-7;
- Amila, Kami., Suratmi, Tri., & Winidyaningsih, Cicilia. (2017). *Analisis Perilaku GAY dalam Upaya Pencegahan Infeksi HIV/AIDS di Kabupaten Bandung Barat Tahun 2016*. Jurnal Bidang Ilmu Kesehatan, 7(1), 533-539. <https://doi.org/10.52643/jbik.v7i1.206>;
- Arifin, H. P., Prasanti Ditha., & Faudy Ikhsan. (2018). *Komunikasi Sosial dalam Mendorong Penetapan Kebijakan Publik HIV/AIDS*. Jurnal Ilmu Komunikasi, 15(2), 203-208. <https://doi.org/10.24002/jik.v15i2.1269>;
- Devi. (2020, 19 Agustus). *Contoh Kerangka Pemikiran dan Cara Membuatnya*. Retrieved from: Contoh Kerangka Pemikiran dan Cara Membuatnya-Tambah Pinter;
- Dunn, William. (2003). *Analisa Kebijakan Publik, Cetakan Kedua*. Yogyakarta: Gajah Mada Press;
- Dunn, William. (2013). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik , Cetakan Kelima*. Yogyakarta: Gajah Mada Universitas Press;
- Fritantus, Yohanes., & Rukminingsih, Nunuk. (2015). *Implementasi Kebijakan Penanggulangan HIV dan AIDS Di Kota Surabaya (Kajian Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2013, Studi Kasus di Puskesmas Putat Jaya, Kota Surabaya)*. JPAP, 1(1), 175-177. <https://doi.org/10.30996/jpap.v1i01.405>;
- Galink. (2013). *Seksualitas Rasa Rainbow Cake: Memahami Keberagaman Orientasi Seksual Manusia*. Yogyakarta: PKBI DIY;
- Gatra. (2019, 2 Oktober). *Cegah HIV, Kadinkes: Banyuwangi Bukan Wisata Malam*. Retrieved from: Cegah HIV, Kadinkes: Banyuwangi Bukan Wisata Malam Kesehatan (gatra.com);
- Giargo, Tryo, Eda. (2019). *Analisis Strategi Pengembangan Objek Wisata (Studi Kasus Goa Selarong Kabupaten Bantul)*. Naskah Publikasi. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Yogyakarta:
- Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2017, Tentang: Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS. Retrieved from: <https://jdih.banyuwangikab.go.id/perda>;
- Pratiwi, Indah. (2017). *Penggunaan Media Video Call Dalam Teknologi Komunikasi*. Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial, 1(2), 216.
- Priambodo, A. K., & Rostyaningsih, D. (2019). *Analisis Aktor Dalam Proses Implementasi Kebijakan Penanggulangan HIV/AIDS Di Kota Semarang (Peraturan Daerah Kota Semarang No. 4 Tahun 2013)*. E-Jurnal, 8(3), 4. <https://doi.org/10.14710/jppmr.v8i3.24160>;
- Priyanto, Hary. (2014). *Penanganan Koflik Sosial Di Kabupaten Banyuwangi*;
- Priyanto, Hary. (2017). *Implementasi Kebijakan Pemerintah Terhadap Prostitusi Yang Berdampak Pada Perkembangan Hiv/Aids Di Kabupaten Banyuwangi*. Jurnal Strategi Bisnis, 5(2), 16;



---

Priyanto, Hary. (2018). *Tinjauan Peraturan Bupati Nomor: 45 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pencegahan Dan Penanggulangan HIV/AIDS Terhadap Perkembangan Prostitusi Kabupaten Banyuwangi*. Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial, 7(1), 36;

Priyanto, Hary., & Noviana, Nana. (2018). *Analisis Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 45 Tahun 2015*. JAKPP, 4(1), 2;